



## PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF  
 LEMBAGA : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
 UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : JOHANES WIDIJANTORO
2. Jabatan : ANGGOTA OMBUDSMAN RI
3. NHK : 854800

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>802.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m <sup>2</sup> /48 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 448.000.000		
2. Tanah Seluas 50 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 150.000.000		
3. Tanah Seluas 8 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 24.000.000		
4. Tanah Seluas 200 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>174.500.000</b>
1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000		
2. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000		
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>35.179.076</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.011.679.076</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>188.125.000</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>823.554.076</b>



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpnn.kpk.go.id](http://elhkpnn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpnn.kpk.go.id](http://elhkpnn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.